

KUALITAS SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KELURAHAN KOTA BARU KOTA PONTIANAK

Rahmah Inda Lusmana
NIM: E.01110103

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Pontianak. Email: rahmahlusmana@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai kualitas sumberdaya dalam implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Kota Baru Kota Pontianak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yakni penulis ingin menggambarkan bagaimana kualitas sumberdaya dalam implementasi PNPM-MP di Kelurahan Kota Baru Kota Pontianak.

Permasalahan yang ada di implementasi PNPM-MP ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih ada beberapa hal yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi PNPM-MP tersebut jika dilihat dari faktor sumberdaya. Faktor – faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya sumberdaya dalam implementasi PNPM-MP yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Selain itu ada faktor lain seperti kesulitan dalam merekrut atau mempertahankan sumberdaya yang kompeten dan tidak terjalannya harmonisasi diantara implementor dalam implementasi PNPM-MP di Kelurahan Kota Baru Kota Pontianak.

Saran yang dapat menjadi pertimbangan yaitu staf atau SDM (sumber daya manusia) dalam implementasi PNPM-MP diberikan pelatihan yang lebih membangun untuk meningkatkan motivasi, SDM dalam implementasi PNPM-MP masih perlu pendampingan oleh fasilitator, pemerintah harus lebih tepat waktu memberikan dana-dana yang akan diberikan untuk kegiatan-kegiatan BKM di setiap Kelurahan, Setiap KSM sebaiknya hanya fokus pada satu usaha saja yang kedepannya bisa menjadi ciri khas Kelurahan Kota Baru, pemerintah juga harus memperhatikan dengan menambah biaya-biaya pelaksanaan program-program PNPM-MP, dan setiap implementor PNPM-MP sebaiknya lebih bisa menjalin hubungan yang baik .

Kata Kunci : Sumber Daya, Implementasi, PNPM-MP, Kelurahan Kota Baru, Staf, Informasi, Wewenang, Fasilitas

Abstract

The purpose of this study is intended to provide an understanding of the quality of resources in the implementation of the national program of urban self-empowerment (PNPM - MP) in the Village of New Town Pontianak .

The method used is descriptive research that the author wanted to illustrate how the quality of resources in the implementation of PNPM - MP in the Village of New Town Pontianak . Existing problems in the implementation of PNPM - MP is quite interesting to study considering there are still some things that cause less successful implementation of PNPM - MP if viewed from resource factors . Factors - the factors that lead to less successful in implementing resource PNPM - MP is the staff , information , authority and facilities . In addition there are other factors such as the difficulty in recruiting or retaining qualified resources and establishment of harmony between the implementor in the implementation of PNPM - MP in the Village of New Town Pontianak .

Suggestions can be taken into consideration , namely the staff or HR (human resources) in the implementation of PNPM - MP given more training to build to improve motivation, human resources in the implementation of PNPM - MP still need a companion of facilitators, the government should provide more timely funds will be given to activities in each Village BKM , every KSM should only focus on the future course of the business can be a hallmark of the New City Village , the government should also pay attention to add the costs of implementing programs PNPM - MP , and every implementor PNPM - MP should be able to establish a good relationship .

Keywords : Resources , Implementation , PNPM - MP , New City Village , Staff , Information , Authority , Facilities

A. PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan mengenai mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga masyarakat miskin tersebut bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah.

Dalam rangka keberlanjutan program sekaligus mendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), telah dibentuk Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Sebagai dasar hukum pelaksanaan PNPM-MP adalah sama dan merujuk pada dasar Hukum PNPM Mandiri, sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri, yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor

31.1 / BAPPEDA / Tahun 2013, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pontianak.

Sebagai kelurahan baru, Kelurahan Kota Baru mulai melakukan sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2009 dengan nama BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) "Kobar Makmur". BKM sendiri memiliki unit dibawahnya yaitu UPK (Unit Pengelola Keuangan) yang mengatur kegiatan dibidang keuangan seperti pinjaman bergulir, UPS (Unit Pengelola Sosial) yang mengatur kegiatan di bidang sosial, UPL (Unit Pengelola Lingkungan) yang mengatur kegiatan di bidang Lingkungan seperti perbaikan jalan. Serta KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai target group. Sejak di implementasikan di Kelurahan Kota Baru, PNPM Mandiri Perkotaan telah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikelurahan setempat. Namun seiring berjalannya waktu fenomena yang terjadi yaitu Masih minimnya peran implementor dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2013-2016, dari 9 implementor BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) hanya 3 atau 4 orang yang aktif. Selain itu Penyampaian informasi dari implementor PNPM-MP Kelurahan Kota Baru Tahun 2013-2016 masih belum jelas, dilihat dari kurang rutinitasnya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang menjadi target *group* dalam menghadiri rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang diadakan implementor PNPM-MP. Masih adanya implementor yang tidak menjalankan wewenangnya yaitu dari Unit Pengelola Sosial (UPS) yang vakum dengan kegiatan-kegiatan PNPM-MP Tahun 2013-2016 serta Kurang efektifnya fasilitas tempat pertemuan antara masyarakat dengan implementor dalam kebijakan PNPM-MP.

Oleh karena itu fokus penelitian ini ialah pada kualitas sumber daya manusia dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Kota Baru Kota Pontianak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan

Secara umum, istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Berdasarkan kedua pendapat diatas maka kebijakan itu dapat dipahami sebagai suatu cara ataupun strategi maupun suatu ketepatan yang dipilih kemudian diarahkan demi pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) merupakan suatu strategi yang dibuat pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat, sebagai upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Selain itu Melalui PNPM Mandiri dilakukan harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

2. Implementasi Kebijakan

Studi Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tagible output*).

Jadi implementasi kebijakan merupakan tindakan secara nyata melaksanakan putusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang guna mencapai tujuan kebijakan. Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan merupakan langkah dalam rangka mencapai tujuan yang digariskan oleh pemerintah dalam usaha menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam tahap implementasi ini pula nasib suatu kebijakan ditentukan.

Namun gagal atau berhasilnya suatu kebijakan tergantung pada proses berlangsungnya kebijakan itu ketika diimplementasikan. Menurut Van Meter Van dan Van Horn (Dalam Agustino, Leo 2008:142) ada enam variabel model proses implementasi kebijakan, yaitu: Ukuran dan Tujuan Kebijakan Publik, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/ Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Menurut Van Meter Van Horn ada tiga sumber daya dalam implementasi yaitu:

1. Sumber daya Manusia

Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

2. Sumber daya finansial

Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

3. Sumber daya Waktu

Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Sedangkan menurut Menurut Edward III (Dalam Winarno 2012:177) gagal atau berhasilnya suatu kebijakan tergantung pada proses berlangsungnya kebijakan itu ketika diimplementasikan. Ada empat variabel model proses implementasikebijakan, yaitu:Komunikasi, Sumberdaya,Disposisi, Struktur Birokrasi

Dalam penelitian penulis akan memfokuskan pada faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yakni Sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplentasikan kebijakan. Menurut Edward III, Sumber daya dalam implementasi kebijakan publik meliputi:

1. Staf

Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Akan tetapi bagaimana kualitas dan motivasi para staf itu sendiri. Dengan demikian tidaklah cukup hanya dengan jumlah pelaksana yang memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan. Para pelaksana harus memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau banyak pembaruan. Latihan-latihan atau *training* yang diberikan kepada implementor atau pelaksana bisa dijadikan solusi untuk meningkatkan kualitas staf. Terkait implementor PNPM-MP di Kelurahan Kota

Baru apakah latihan-latihan tersebut ada atau tidak, sehingga harapannya kemampuan profesional mereka mengalami kenaikan. Selain itu adalah kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan para implementor yang kompeten karena pada umumnya gaji dan jaminan kerja yang rendah. Terkait para pelaksana PNPM-MP adalah relawan yang tidak digaji. Namun demikian , uang tidak selalu merupakan jawaban terhadap kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul. Dalam kenyataannya dana yang besar tidak selalu mudah mendapatkan personil yang terampil. Hal ini terjadi karena pemerintah mengatur persoalan-persoalan teknis dengan sangat tinggi. Sesuatu yang justru menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Terkadang pesronil-personil yang dibutuhkan ada tetapi tidak mau dipekerjakan. Terkait implementor program PNPM-MP di kelurahan KotaBaru, yaitu bagaimana penyatuan tujuan bersama serta hubungan antara BKM dengan unit-unit lain seperti UPK (Unit Pengelola Keuangan), UPL (Unit Pengelola Lingkungan), UPS (Unit Pengelola Sosial) dan Sekretariat.

2. Informasi

Informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para implementor dalam implementasi PNPM-MP harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan agar dapat dengan mudah melalukan harmonisasi dengan masyarakat yang menjadi sasaran. Ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan akan menghambat keberhasilan implementasi. *Bentuk kedua* dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Dalam hal ini kebijakan mengenai Implementasi PNPM-MP di Kelurahan Kota Baru tidak hanya pada implementor saja tetapi bagaimana andil

dari sumber daya yang lain yaitu Masyarakat.

Informasi mengenai program-program adalah penting terutama program jangkar menengah (PJM) yang ada di PNPM-MP di Kelurahan Kota Baru, misalnya perbaikan jalan dan informasi tentang bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Ketika suatu program dari PNPM-MP ingin diimplementasikan terkadang direncanakan tahun ini akan tetapi diundur hingga tahun depan karena keterlambatan pencairan dana dari pusat. Terkait implemtnasi PNPM-MP di Kelurahan Kota Baru seringkali kali dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti perbaikan jalan terlambat dikucurkan sehingga terjadi *miss* komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PU (Pekerjaan Umum) sehingga perbaikan jalan lebih dulu di kerjakan oleh PU. Seperti kita ketahui dana PNPM menggunakan APBN sedangkan PU menggunakan APBD.

3. Wewenang

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Kurangnya wewenang yang efektif disadari oleh para pejabat dan karena itu, mereka membutuhkan kerjasama dengan pelaksana-pelaksana lain jika mereka ingin melaksanakan program-program dengan berhasil. Mengenai implementor dalam kebijakan PNPM merupakan implementor yang ditunjuk dan dengan suka rela untuk menjalani wewenang tersebut, artinya bisa saja implementor tersebut mengerjakan sesuai wewenangnya atau tidak karena implemendor tersebut juga tidak digaji.

4. Fasilitas

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa

perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Dalam hal ini implementor dari kebijakan PNPM-MP di Kelurahan Kota Baru, apakah memiliki akses bangunan untuk melakukan pertemuan-pertemuan terkait kebijakan tersebut atau tidak.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yakni penulis ingin menggambarkan bagaimana kualitas sumberdaya dalam implementasi PNPM-MP di Kelurahan Kota Baru. Penelitian ini menggambarkan suatu gejala sosial tertentu berdsarkan data dan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengembangan konsep dan pengumpulan data, kemudian menganalisis suatu obyek penelitian secara rinci dan mendalam. Seperti yang dikatakan Moelong (2004:6) bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan objek yang diteliti dengan sasaran atau bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara nyata.

Waktu penelitian ini dilaksanakan 6 bulan dari bulan Oktober 2013 – Maret 2014. Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sumber daya dalam implementasi PNPM-MP di Kelurahan Kota Baru Kota Pontianak Kabupaten Sintang. Subjek dalam penelitian ini diambil secara *purposive*. Ini dilakukan karena peneliti ingin mencari informasi sedalam – dalamnya dan selengkap – lengkapnya mengenai permasalahan kualitas sumber daya dalam implementasi PNPM-MP yaitu Koordinator Kota PNPM-MP Kota Pontianak (1 orang), Lurah Kota Baru (1 orang), Senior Fasilitator Kelurahan Kota Baru (1 orang), Fasilitator Sosial (1 orang), Fasilitator Infrastruktur (1 orang), Fasilitator Manajemen Keuangan (1 orang), Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) (1 orang), Anggota BKM (2 orang), Sekretaris BKM (1 orang), Ketua UPK (Unit Pengelola Keuangan) (1 orang), Ketua UPS (Unit Pengelola Sosial) (1 orang), Ketua UPL (Unit Pengelola Lingkungan) (1 orang), Ketua KSM (Kelompok Swadaya

Masyarakat) (6 orang), serta Tokoh Masyarakat Kelurahan Kota Baru (3 Orang)

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun alat (instrumen) pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain panduan observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Selanjutnya Miles dan Huberman menjelaskan (dalam Ulber Silalahi 2010 : 339-341) bahwa kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menguji data yang diperoleh dalam penelitian itu sah dan benar maka diperlukan uji kredibilitas. Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan mengadakan *member check*. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. *Member check* yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Sumber Daya Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Kelurahan Kota Baru Kota Pontianak.

a. Staf

Membangun masyarakat warga (*civil society*) di tingkat lokal (kelurahan) merupakan upaya yang strategis untuk menumbuhkan inisiatif, solidaritas dan keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu kehadiran masyarakat (*civil society*) menjadi sangat penting sebagai suatu tatanan baru hidup bermasyarakat, dimana warga masyarakat berhimpun atas prakarsa sendiri, bekerja sama dan secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan otonominya terhadap institusi pemerintah, politik, militer, agama, usaha pekerjaan dan keluarga. Tatanan hidup bermasyarakat tersebut mesti

tumbuh berkembang berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan.

Penanggulangan kemiskinan dipandang sebagai proses berkelanjutan dan memerlukan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti demokratis, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi serta menjunjung tinggi nilai-nilai dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, kejujuran, keadilan, kesetaraan dan kebersamaan dalam keragaman.

Menyadari bahwa untuk membangun masyarakat warga (*civil society*) dan menanggulangi kemiskinan itu memerlukan upaya yang sungguh-sungguh sistematis dan terorganisir, maka dari itu dibentuklah suatu badan keswadayaan masyarakat di tingkat kelurahan yang kemudian di sebut BKM.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah Dewan Pimpinan Kolektif Masyarakat warga penduduk kelurahan dan sebagai lembaga BKM yang dapat bertindak sebagai representatif terhadap masyarakat warga penduduk kelurahan. BKM ini bernama BKM Kobar Makmur yang didirikan pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2009. BKM ini berkedudukan di Kantor Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

Untuk membantu tugas dan fungsinya, maka BKM dapat mengangkat perangkat organisasi seperti: Sekretariat, Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan unit Pengelola Sosial. BKM sendiri didampingi oleh Fasilitator untuk setiap kelurahan. Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat adalah jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah maupun staf, namun disisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

Dari segi pendidikan, untuk SDM di Organisasi PNPM tersebut masih sangat minim sekali. Hanya ada empat orang saja yang lulusan sarjana. Memang ini tidak bisa dijadikan tolak ukur SDM

itu sendiri dalam mensosialisasikan PNPM ke masyarakat tetapi akan lebih baik lagi jika semua SDM tersebut berkompeten di bidangnya. Seperti misalnya di bidang UPK (Unit Pengelola Keuangan) yang mengurus ekonomi bergulir harus membuat laporan dan menagih yang terlambat mengembalikan dana pinjaman. UPK di Kelurahan Kota Baru ini bukan merupakan lulusan sarjana ekonomi atau mempunyai *basic* ekonomi, yang harus membuat laporan-laporan mengenai pertanggungjawaban ke Koordinator Kota, tentu SDM tersebut tidak bisa, dan sampai saat ini masih terus didampingi oleh Fasilitator di bidang Manajemen Keuangan. Hal ini tentu akan sulit jika kedepannya masih terus didampingi, karena akan ada wacana untuk kelurahan Kota Baru ini tidak perlu di fasilitasi oleh fasilitator lagi, karena sudah bisa dikatakan mandiri untuk PNPM di Kelurahan Kota Baru ini. Tentunya kita juga harus tetap menghargai pekerjaan yang sudah dilakukan oleh ketua UPK tersebut.

Dengan demikian, tidaklah cukup hanya dengan jumlah pelaksana yang memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan. Para pelaksana harus memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kurangnya sumberdaya yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau banyak pembaruan.

b. Informasi

Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka seharusnya melakukannya. Dari hasil wawancara dengan Koordinator BKM bahwa pada dasarnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang tergabung dalam BKM sudah mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka, akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat kurang, seperti ketika ada rebug warga tidak semua yang mau hadir. Dari hasil pengamatan dilapangan, bahwa di antara sesama anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut tidak terjadi keharmonisan, saling menjatuhkan satu sama lain. apalagi untuk organisasi BKM ini telah mengalami pergantian koordinator. Para anggotanya pun terpaksa kepada

koordinator tersebut. Padahal tidak ada garis hierarki antara koordinator BKM dengan Anggota BKM.

Bentuk kedua dari informasi adalah tentang ketaatan sumberdaya manusia terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Jika kita melihat di Struktur tersebut, koordinator sendiri ketika misalnya ada anggotanya yang tidak aktif langsung ingin diberhentikan dan cari anggota baru, padahal kalau kita melihat peraturan yang ada, pergantian anggota tersebut harus melalui musyawarah dan diputuskanlah melalui berita acara.

Selanjutnya mengenai informasi tentang program-program yang ada di BKM tidak semua masyarakat tahu akan hal ini. Seharusnya BKM harus membuat terobosan baru agar masyarakat dikelurahannya mengetahui apa-apa saja program-program dari pemerintah untuk mereka, terutama bagi mereka yang miskin atau kurang mampu.

Walaupun informasi-informasi yang diberikan untuk penguatan BKM itu sendiri sudah ada, seperti adanya Rapat dan evaluasi di tingkat Kota dan kecamatan yang jangka waktunya 1 bulan sekali, di BKM dan KSM dan relawan-relawan juga ada kegiatan yang tujuannya untuk memotivasi mereka dengan mengundang narasumber yang tepat akan tetapi masih saja rapat-rapat atau kegiatan tersebut hanya menjadi *ceremonial* belaka, contohnya di pelatihan penguatan BKM dan struktur dibawahnya, kegiatan ini terlaksana namun ketika dilapangan tidak semua anggota BKM tersebut hadir dengan berbagai alasan, dan kegiatan tersebut hanya sebatas menjalankan amanah saja karena anggaran kegiatan tersebut ada di BOP, jika tidak terlaksana maka dana tersebut akan sia-sia. Padahal jika dimanfaatkan benar-benar kegiatan tersebut oleh seluruh elemen yang bersangkutan tentunya akan memudahkan dalam pelaksanaan dilapangan dan pemberian informasi kepada masyarakat.

Terkait ketidaktahuan masyarakat akan PNPM tentunya bukan saja dari sosialisasi BKM yang kurang akan tetapi masyarakat juga yang kurang peduli akan program-program di PNPM maupun di BKM tersebut, tentunya tidak semua masyarakat tidak tahu, ada juga yang tahu tetapi tidak mau tahu. Padahal jika menurut AD (Aturan Dasar) BKM Kobar Makmur yang menjadi anggota BKM bukan anggota BKM yang tercatat dalam struktur tersebut akan tetapi seluruh masyarakatlah

yang menjadi anggota, BKM hanya Dewan Pimpinan Kolektif untuk setiap kelurahan. Selain masyarakat yang tidak tahu akan adanya PNPM yaitu masyarakat masih menganggap PNPM adalah bantuan Dana untuk masyarakat. Padahal dana bukan prioritas suatu masyarakat itu dapat berkembang, akan tetapi potensi- potensi atau keterampilan-keterampilanlah yang harus dimiliki masyarakat dan harus dikembangkan. Hal ini juga pernah disampaikan Senior Fasilitator untuk Kelurahan Kota Baru, yang bernama Umi Latifah, S. Hut pada saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 7 Januari 2014 yang menyatakan bahwa:

Masyarakat masih menganggap bahwa dana bantuan PNPM tersebut adalah dana hibah yang tidak mesti dikembalikan, padahal itu merupakan Dana stimulan atau dana suntikan untuk merangsang masyarakat agar bisa belajar bagaimana menggali potensi yang ada di dirinya. Dana bukan solusi satu-satunya untuk pengentasan kemiskinan akan tetapi bagaimana masyarakat itu bisa mandiri dengan usaha-usaha yang mereka jalani.

Dari pernyataan tersebut jelaslah bahwa informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat kurang, walaupun dari pihak implemendor tersebut menyangkal bahwa sudah semaksimal mungkin memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan tetapi tidak semua masyarakat tahu, hanya masyarakat yang berdekatan dengan anggota BKM saja yang tahu. Memang media RT sudah dimanfaatkan untuk sosialisasi PNPM ini akan tetapi belum berhasil karena kesibukan RT-RT atau bahkan ketidakperdulian, kembali lagi bahwa SDM (Sumber Daya Manusia) di PNPM ini merupakan para relawan bukan karyawan. Untuk itulah diperlukan kerjasama yang baik antara pemberi informasi dan yang diberikan informasi.

c. Wewenang

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Bila wewenang formal tidak ada, atau sering disebut sebagai wewenang diatas kertas, seringkali disalahmengerti oleh para pelaksana dengan wewenang yang efektif. Kurangnya wewenang yang efektif disadari oleh para implemendor, dan karena itu mereka membutuhkan kerjasama dengan pelaksana lain.

Jika dilihat di struktur BKM pada dasarnya semua elemen yang tergabung dalam PNPM di Kelurahan Kota Baru tersebut sudah bisa dikatakan paham akan tupoksinya, akan tetapi kembali lagi ke individu masing-masing bahwa tidak semua elemen tersebut menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini bisa dilihat pada Unit Pengelola Sosial yang vakum. Hal tersebut disebabkan selain dana untuk bidang sosial belum cair ada masalah lain yaitu ketidaksanggupan SDM tersebut untuk menangani kegiatan di bidang sosial, Hal ini pernah disampaikan oleh Koordinator BKM itu sendiri yaitu Sudiman pada tanggal 8 Januari 2014 yang menyatakan bahwa :

Kembali lagi bahwa ini merupakan organisasi yang bersifat sosial, artinya kembali lagi pada hati setiap individu. Jika ada yang tidak aktif dikepengurusan BKM itu sendiri memang benar adanya. Hanya 3-4 orang saja yang rutin hadir di setiap kegiatan. BKM ini dibentuk melalui PEMILU berarti masyarakat bebas memilih dan yang terpilih pun tentunya harus sadar akan tugas dan fungsinya.

Dari paparan tersebut jelaslah bahwa wewenang yang dimiliki oleh setiap implemendor atau staf belum sepenuhnya dijalankan, meski menurut hasil laporan evaluasi untuk kelurahan Kota Baru ini sudah bisa dikatakan mandiri akan tetapi masih perlu pendampingan oleh fasilitator. Apalah arti sebuah laporan yang baik untuk pemerintah jika dilapangan sebenarnya belum sepenuhnya terlaksana. Karena setiap kegiatan hanya arwah saja artinya hanya sebatas kegiatan untuk dipertanggungjawabkan melalui laporan tetapi roh dari manfaat berbagai kegiatan tersebut belum dapat dimanfaatkan.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting yang menjadi faktor dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya. Tetapi tanpa bangunan sebagai tempat untuk melakukan koordinasi tanpa perlengkapan tanpa perbekalan maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Terkain fasilitas yang ada pada PNPM-MP Kelurahan Kota Baru ini yaitu Memang Pemerintah tidak mengizinkan setiap Kelurahan yang diwakili oleh organisasi yang bernama BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) mendirikan suatu gedung menggunakan anggaran BOP (Bantuan Operasional Prasarana) atau dana lainnya.

Program PNPM itu sendiri tidak hanya fasilitas fisik yang berupa gedung tempat pertemuan yang dibicarakan, fasilitas lain adalah Dana Pinjaman Bergulir yang diperuntukkan untuk warga yang tergolong kurang mampu dengan tujuan untuk membuka atau mengembangkan usaha masyarakat yang dipinjam modal tersebut. Masyarakat yang ingin meminjam tersebut wajib membuat Satu kelompok yang berjumlah 5 orang yang kemudian disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan dipilih satu orang ketua yang bertanggungjawab atas pinjaman tersebut.

Dari 31 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang ada di Kelurahan Kota Baru ada 5 KSM yang terlambat mengembalikan. Setiap KSM tersebut memiliki bidang usaha yang beraneka ragam disetiap kelompoknya. Setiap KSM tersebut jika tepat waktu mengembalikan uang maka akan dapat memperoleh pinjaman yang lebih besar dari sebelumnya sampai pinjaman 10.000.000,-. Setiap KSM dikenakan bunga sebesar 0,5 % setiap peminjaman. KSM tersebut tidak semuanya aktif, artinya ada beberapa KSM yang terlambat mengembalikan pinjaman.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan fasilitator bidang manajemen keuangan yaitu Karnila Susanti, A.Md pada tanggal 11 Januari 2014 yang menyatakan bahwa.

faktor penyebab keterlambatan tersebut diantaranya kurangnya persisapan dari kami selaku pihak yang mengelola keuangan di BKM. Selain itu mereka yang terlambat menganggap pinjaman tersebut merupakan dana hibah yg tidak perlu dikembalikan. Ada juga faktor masyarakat yang tidak amanah serta ada juga yang tidak menggunakan dana tersebut untuk modal usaha tetapi untuk keperluan pribadi.

Jadi jelaslah bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami akan pemanfaatan Dana PNPM itu sendiri. Kurangnya sosialisasi dari UPK juga merupakan salah satu faktor. Tidak semua masyarakat mengerti dan

Rahmah Inda Lusmana

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

memahami, masyarakat butuh arahan yang tepat dan bersifat persuasif. Dari wawancara beberapa KSM yang terlambat tersebut jelaslah bahwa mereka masih butuh pendamping untuk merubah pola pikirnya. BKM dan segenap Unit-unit dibawahnya mempunyai tanggung jawab akan hal tersebut. Dari keterlambatan Pengembalian dana tersebut seharusnya diberikan sanksi yang tegas, hal ini pun didukung oleh Koordinator Kota PNPM Kota Pontianak yang menurutnya BKM harus tegas terhadap KSM yang terlambat mengembalikan dana pinjaman tersebut. Selain adanya masalah keterlambatan tersebut, masalah lain yang terjadi di KSM adalah tidak semua masyarakat mengerti akan hakekat PNPM itu sendiri, dana pinjama bergulir merupakan suatu media agar masyarakat bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya bukan hanya pinjaman seperti halnya koperasi simpan pinjam. Contohnya ada masyarakat tersebut ahli dibidang aneka pembuatan kue-kue tradisional maupun modern, masyarakat tidak hanya menjual di dalam lokal saja tetapi bagaimana bisa menjual produk tersebut sampai ke minimarket-minimarket bahkan supermarket, tentunya dengan tampilan atau *packaging* yang menarik konsumen.

Masyarakat di Kelurahan Kota Baru hanya paham bahwa PNPM adalah dana bantuan kepada masyarakat untuk sekedar membuka usaha dan atau menambah modal usaha. Ada juga yang tidak mempergunakan modalnya untuk usaha, hal ini terbukti dari pernyataan Koordinator BKM yang menyatakan bahwa, selama ini para KSM meminjam dana akan melambung pada bulan-bulan menjelang hari raya atau liburan kenaikan kelas anak-anak. Kedepannya solusinya adalah BKM bekerjasama dengan UPK sepakat bahwa tidak akan meminjamkan menjelang hari raya atau menjelang kenaikan siswa sekolah, akan tetapi kami akan membuat terobosan baru nantinya karena kami tidak mau hal tersebut terulang kembali.

Selain itu hal yang paling dasar menurut peneliti adalah seandainya dana setiap KSM tersebut hanya fokus pada suatu usaha yang kedepannya bisa menjadi ciri khas Kelurahan Kota Baru tentunya akan lebih baik lagi dan akan dikenal oleh masyarakat tentang keberhasilan PNPM itu sendiri. Karena yang terjadi selama ini modal usaha dipinjamkan satu kelompok misalnya 2.500.000

dan dibagi 5 orang, masing-masing mendapatkan 500.000 untuk membuat usaha. katakanlah usaha kue-kue tradisional biasa, cukup memang cukup akantetapi lebih baik uang 2.500.000 digunakan untuk modal usaha bersama-sama 1 kelompok sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan semata tetapi diantara masyarakat tersebut bisa terjalin hubungan komunikasi yang baik, bisa bertukar ide-ide dan harapannya produk yang dihasilkan oleh KSM tersebut bisa jadi ciri khas komoditas utama Kelurahan Kota Baru sehingga tercipta kemandirian masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan,

Selain program-program dibidang Ekonomi tersebut yaitu berupa pinjaman dana bergulir, PNPM melalui PJM (Program Jangka Menengah) untuk bidang lingkungan juga membuat program-program seperti Rehabilitasi jalan, Rabat beton dan pelebaran jalan.

Adapun faktor lain yang menyebabkan kualitas sumber daya dalam implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Perkotaan belum berhasil ialah :

1. kesulitan dalam merekrut atau mempertahankan sumberdaya yang kompeten

Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia tersebut adalah relawan bukan karyawan yang setiap bulannya menerima honor atau gaji. Implementor tersebut hanya mendapatkan insentif sebesar 25.000 – 50.000 ketika menghadiri rapat atau pertemuan-pertemuan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Koordinator Kota PNPM-MP Kota Pontianak yaitu Bapak Heri Purwanto, ST pada tanggal 6 Januari 2014 yang menyatakan bahwa:

...Kelemahannya yaitu pada sumber daya BKM itu sendiri, yang mana sering terjadi pergantian sumberdaya manusia. Hal ini disebabkan karena mereka bukan karyawan yang mesti digaji tetapi relawan yang bekerja suka rela. Artinya kita tidak bisa menuntut banyak hal kepada sumberdaya manusia yang tergabung dalam BKM tersebut. Walaupun ini adalah relawan tetapi dalam pelaksanaan program-program dimasyarakat sumberdaya manusia di BKM harus tegas...

2. Tidak terjadinya harmonisasi diantara anggota BKM.

Dalam kepengurusan anggota BKM tidak terjalin harmonisasi antara sebagian anggota dengan anggota lainnya, jika tidak sejalan satu visi dan

Rahmah Inda Lusmana
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

misi maka anggota BKM yang bersangkutan tidak mau aktif dalam pertemuan seperti misalnya rapat atau pelaksanaan program dilapangan. Ketika misalnya ada bantuan perbaikan jalan atau bantuan pembuatan WC bagi masyarakat yang tidak mampu, Di anggota BKM tersebut memprioritaskan wilayahnya atau di lingkungan RT nya, ketika ada yang tidak dapat, terjadilah kecemburuan sosial, padahal untuk datang merembukkan rencana program tersebut masyarakat yang cemburu tersebut tidak hadir, sehingga diputuskan perbaikan-perbaikan jalan di wilayah anggota BKM yang aktif. Tentu hal ini sebenarnya tidak baik dilakukan, karena bagaimanapun seharusnya pembangunan wilayah harus menggunakan skala prioritas.

E. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Sebagai akhir dari tulisan artikel ini, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kualitas sumber daya dalam implementasi PNPM-MP di Kelurahan Kota Baru Kota Pontianak kurang berhasil. Adapun faktor – faktor tersebut yaitu:

1. Faktor Staf

Staf atau sumber daya manusia tersebut belum sepenuhnya berpotensi untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang dapat digunakan. Ketika ada pertemuan seperti rapat tahunan atau kegiatan penguatan setiap unit yang terjadi adalah tidak semua mereka yang tergabung dalam organisasi tersebut hadir, hanya sepertiga saja yang hadir, hal ini sungguh sangat menyulitkan anggota BKM lain untuk terjun melaksanakan program-program Pengentasan Kemiskinan.

Saran dari peneliti yaitu Para pelaksana atau sumber daya manusia di PNPM Kelurahan Kota Baru harus memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kurangnya sumberdaya yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau banyak pembaruan. Sebaiknya staf atau SDM dalam implementasi PNPM diberikan pelatihan atau *training* yang lebih membangun untuk meningkatkan motivasi mereka dalam rangka implementasi PNPM-MP tersebut.

2. Faktor Informasi

Faktor Informasi, yaitu Selain masyarakat yang tidak tahu akan adanya PNPM yaitu masyarakat masih menganggap PNPM adalah bantuan Dana untuk masyarakat. Padahal dana bukan prioritas suatu masyarakat itu dapat berkembang, akan tetapi potensi - potensi atau keterampilan - keterampilanlah yang harus dimiliki masyarakat dan harus dikembangkan.

Saran dari peneliti untuk faktor informasi yaitu Sumber Daya di Dalam implementasi PNPM-MP di Kelurahan Kota Baru ini masih perlu pendampingan oleh fasilitator. Karena keberhasilan PNPM juga merupakan keberhasilan BKM di setiap kelurahan.

3. Faktor Wewenang

Faktor Wewenang, yaitu wewenang yang dimiliki oleh setiap implementor atau staf belum sepenuhnya dijalankan, hal ini bisa dilihat dari Unit Pengelola Sosial yang tidak ada melaksanakan program-program karena dana untuk kegiatan tersebut belum dicairkan pemerintah

Saran dari peneliti untuk faktor wewenang ini yaitu pemerintah harus lebih memperhatikan waktu terkait dana-dana yang akan diberikan untuk kegiatan-kegiatan BKM di setiap Kelurahan, karena jika sering terlambat maka pelaksanaan program-program di setiap kelurahan menjadi terhambat juga, padahal untuk kelurahan Kota Baru ini yang perlu difokuskan adalah kegiatan di Bidang sosial, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana bisa merubah pola pikir yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya, mandiri dan madani.

4. Faktor Fasilitas

Faktor Fasilitas, yaitu Dari program PNPM itu sendiri tidak hanya fasilitas fisik yang berupa gedung tempat pertemuan yang dibicarakan, fasilitas lain adalah Dana Pinjaman Bergulir yang diperuntukkan untuk warga yang tergolong kurang mampu dengan membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan tujuan untuk membuka atau mengembangkan usaha masyarakat yang dipinjam modal tersebut. KSM tersebut tidak semuanya aktif, artinya ada beberapa KSM yang terlambat mengembalikan pinjaman.

Saran dari peneliti untuk faktor fasilitas yaitu Setiap KSM sebaiknya hanya fokus pada satu

usaha saja yang kedepannya bisa menjadi ciri khas Kelurahan Kota Baru tentunya akan lebih baik lagi dan akan dikenal oleh masyarakat tentang keberhasilan PNPM itu sendiri. Lebih baik uang dipinjam untuk modal usaha bersama-sama satu kelompok dan tidak dibagi per orang terlebih dahulu tetapi fokus pada satu usaha yang dirintis bersama, sehingga kedepannya tidak hanya mendapatkan keuntungan semata tetapi diantara masyarakat tersebut bisa terjalin hubungan komunikasi yang baik, bisa bertukar ide-ide dan harapannya produk yang dihasilkan oleh KSM tersebut bisa jadi ciri khas komoditas utama Kelurahan Kota Baru sehingga tercipta kemandirian masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

5. Faktor Kesulitan merekrut atau mempertahankan Sumber daya

Faktor lain adalah kesulitan dalam merekrut atau mempertahankan sumberdaya yang kompeten karena seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia tersebut adalah relawan bukan karyawan yang setiap bulannya menerima honor atau gaji.

Saran dari peneliti yaitu Sebaiknya pemerintah memperhatikan juga kepada setiap relawan dalam organisasi PNPM tersebut, tidak hanya mendapatkan insentif sebesar 25.000 – 50.000 dari hasil sisa kegiatan tetapi pemerintah juga harus memperhatikan dengan menambah biaya-biaya pelaksanaan program-program PNPM-MP, sehingga dapat meningkatkan motivasi implementor untuk sungguh-sungguh menjalankan tugas dan fungsinya.

6. Faktor Tidak Terjalin Harmonisasi di Antara Anggota BKM

Faktor lain selanjutnya yaitu Tidak terjadinya harmonisasi diantara anggota BKM, Jika tidak sejalan satu visi dan misi maka anggota BKM yang bersangkutan tidak mau aktif dalam pertemuan seperti misalnya rapat atau pelaksanaan program dilapangan.

Saran dari peneliti yaitu Setiap implementor PNPM-MP sebaiknya lebih bisa menjalin hubungan yang baik, meskipun terkadang sering terjadi beda pemikiran, ada baiknya implementor mengadakan suatu pertemuan yang tidak hanya

membahas mengenai kegiatan-kegiatan PNPM, tetapi pertemuan tersebut misalnya dengan agenda seperti liburan keluarga di tempat rekreasi atau tempat wisata, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis

F. REFERENSI

Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: PT. Alfabeta.

Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong J. Lexy, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

-----, 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Purwanto, Agus Erwan & Sulistyastuti, Ratih Dyah. 2012. *Implementasi kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi*. Malang: Banyuwangi. 2004.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Seru.

-----, 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPZ.

Sumber Lain :

Asshofi, Agil. Januari 2012. *PNPM Mandiri*. Diambil pada tanggal 20 Oktober 2013 dari <http://agil-asshofie.blogspot.com/2012/01/program-pnpm.html>

Aturan Dasar BKM “Kobar Makmur”

Aturan Rumah Tangga BKM “Kobar Makmur”

Kementerian Pekerjaan Umum, 2010. Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pontianak.

Keputusan Walikota Pontianak Nomor 31.1/BAPPEDA Tahun 2013, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pontianak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
 Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
 Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
 Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Rahmah Inda Lusmana
 NIM / Periode lulus : E01110103
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/HP : rahmahindalusmana@yahoo.co.id / 085245767207

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**):

KUALITAS SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN
 KOTA BARU KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal

Dr. Erdi M.S.
 NIP.19670127 200501 1001

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal: 6 Mei 2014

(Rahmah Inda Lusmana)
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).